

MAFIA VAKSINASI SEBAGAI BENTUK PENJAJAHAN BARU DI INDONESIA

Gabriel James Seso¹, Aloysius Wangku², Yohanes Ndeo³

sesojames789@gmail.com¹, anowangku@gmail.com², jordynjuanno@gmail.com³

IFTK Ledalero

ABSTRAK

Hadirnya covid-19 di Indonesia sungguh membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pengadaan vaksin. Penyuntikan vaksin diwajibkan oleh pemerintah bagi semua masyarakat Indonesia. Sekalipun demikian, kebijakan ini tidak luput dari penolakan yang dipenuhi dengan kecurigaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui serta mengupas secara lebih mendalam apakah kebijakan vaksinasi merupakan kebijakan yang memiliki tujuan yang luhur dan mulia, ataukah ada agenda tersembunyi yang tidak diketahui oleh masyarakat luas? Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui jurnal Nasional, buku dan yang berlandaskan pada asumsi awal, bahwa kebijakan vaksinasi merupakan bentuk penjajahan gaya baru. Kesimpulan: jika kita melihat dan memahami definisi penjajahan maka kita akan menemukan bahwa kebijakan vaksinasi membuat masyarakat kecil menjadi tidak bebas, karena mereka secara terus-menerus dipaksakan untuk menyerahkan diri untuk divaksin. Ini adalah bentuk penjajahan terhadap masyarakat kecil. Jadi bagi penulis vaksin adalah bentuk penjajahan gaya baru.

Kata Kunci: Covid-19, Vaksin, Penjajahan.

ABSTRACT

The presence of COVID-19 in Indonesia is having a serious effect on society. There were many ways that the government did so that people's health was maintained. One of the things the government is doing is acquiring vaccines. Vaccine injections are required by the government for all Indonesian people. However, this policy was not immune to suspicion. The purpose of this paper is to find out and explore in more depth whether the vaccination policy is a policy that has noble and noble goals, or is there a hidden agenda that is not known to the wider community? The method used is a literature study through national journals, books and based on the initial assumption that the vaccination policy is a form of new-style colonization. Conclusion: If we look at and understand the definition of colonization, we will find that the vaccination policy makes small communities unfree, because they are constantly forced to submit themselves to be vaccinated. This is a form of colonization of small communities. So According to the author, vaccines constitute a new form of colonisation.

Keywords: Covid-19, Vaccine, Colonization.

PENDAHULUAN

Covid 19 menjadi penyakit yang sangat ditakuti di seluruh dunia terlebih khusus di Indonesia. Wabah Corona virus Disease 2019 (Covid-19) muncul pertama kali pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China (Ramadhan Muhamin¹, Rizal A Hidayat², Eldha Mulyani, 2021:144). Pada tanggal 2 maret 2020 Indonesia untuk pertama kalinya mengkonfirmasi kasus covid 19 (Ikfina Cairani, 2020: 39). Dan pada tanggal 28 mei 2020 tercatat 31.024 kasus covid 19 yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia (Ikfina Cairani, 2020:39). Hal ini disebabkan karena kurangnya aturan yang tegas dari pemerintah untuk melakukan penanganan covid19 secara cepat, sehingga disaat keadaan covid semakin panas masih ada warga negara yang keluar masuk dari dalam negeri ke luar negeri atau pun sebaliknya. Ada begitu banyak persoalan yang di akibatkan oleh pandemi covid ini, antara lain;

banyak sekolah dan kantor-kantor pemerintahan yang terpaksa diliburkan, orang tidak boleh saling mengunjungi satu sama lain, berpergian dalam negeri harus memiliki surat jalan yang jelas dan masih banyak lagi yang lainnya. Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini, salah satunya dengan penggunaan vaksin. Vaksin yang disediakan pun memiliki beberapa jenis antara lain: vaksin sinovac, vaksin astrazeneca, vaksin moderna, vaksin sinopharm, vaksin Pfizer inc dan bioNtech, vaksin novavax, vaksin sputnik v, vaksin janssen, vaksin convidencia, vaksin zifivax (www.halodoc.com, diakses pada 3 februari 2023). Dengan banyaknya jenis vaksin yang digunakan ini, tentu akan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Tercatat pada senin 12 juli 2021 indonesia mengeluarkan biaya sebesar Rp 10,2 triliun hanya untuk membeli vaksin (www.cnnindonesia.com, diakses pada 3 februari 2023). Sekalipun dengan biaya sebanyak itu yang telah dikeluarkan tidak berarti vaksin itu 100% aman. Berdasarkan kesaksian dari ketua komisi nasional kejadian ikutan pasca imunisasi (komnas KIPI) Hindra irawan safari mengungkapkan dari ratusan laporan KIPI, ada 30 kasus meninggal dunia setelah divaksinasi covid-19 (Haryanti Puspasari,2021). Dari 30 kasus itu, tidak semuanya karena disuntik vaksin, melainkan ada penyakit lain. Hindra Irawan Safari menerangkan bahwa “yang meninggal dari (setelah divaksin) sinovac ada 27. Dari 27 itu, 10 karena terinfeksi covid-19, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah dan Hindra juga menegaskan ada 3 kasus meninggal dunia setelah divaksin menggunakan jenis astrazeneca (Haryanti Puspa Sari,2021). Berdasarkan kasus-kasus diatas, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah pertama, mengapa pemerintah berani mengeluarkan biaya yang begitu banyak hanya untuk membeli vaksin, yang nyatanya malahan membunuh dan bukan mengobati? Kedua, jika pemerintah sudah tahu bahwa vaksin memiliki efek yang sebegitu parah, mengapa tindakan vaksinasi masih tetap dijalankan dan bahkan melakukan tindakan pemaksaan, dalam artian bahwa semua masyarakat diwajibkan untuk divaksin?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menggumuli tulisan ini adalah metode studi kepustakaan, dan setelah itu penulis akan mencari dan menganalisis semua sumber yang berhubungan dengan kegiatan vaksinasi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Sumber-sumber yang ada digunakan sebagai penopang dan penguat gagasan penulis yang menaru asumsi bahwa vaksinasi di Indonesia merupakan bentuk penjajahan baru dari negara-negara maju. Penulis juga menggunakan jurnal-jurnal online yang berbicara khusus tentang covid-19 dan vaksinasi di Indonesia. Sumber-sumber yang digunakan berupa sumber sekunder yang akan dibarengi dengan analisis realitas vaksinasi di Indonesia oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas covid-19 yang sudah membuat gempar dunia dan cukup membawa banyak kesulitan, mesti segera dilawan. Masuknya covid-19 di Indonesia pada tahun 2020 membuat pemerintah harus memutar otak untuk segera mengatasinya. Banyak hal yang telah diusahakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah covid-19 ini dan salah satunya adalah dengan membeli vaksin yang dijual oleh negara-negara maju. Tak adanya pilihan lain membuat pemerintah Indonesia dengan lekas mengambil jalan vaksinasi, tanpa ada perundingan bersama masyarakat. Hal ini bisa dibilang sangat gegabah dan penuh dengan kekeliruan. Untuk menggunakan vaksin atau tidak, seharusnya didiskusikan bersama semua masyarakat, baru setelah itu kita menjatuhkan keputusan bersama, begitulah seharusnya pemerintah bekerja, apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi.

Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat diposisikan sebagai unsur terpenting, karena rakyatlah yang mempunyai kuasa dan daulat atas sebuah negara, meskipun kemudian dalam praktiknya kedaulatan yang dimiliki rakyat dimandatkan kepada para penyelenggara negara (Luthfi J. Kurniawan, 2021: 38). Untuk itu, rakyatlah yang seharusnya menjadi penentu semua kebijakan dan berdasarkan ijin dari rakyat, barulah kebijakan itu dapat diterapkan. Tapi pada nyatanya, rakyat semacam dijadikan objek politik pembangunan yang hanya sebatas menyebut demi kepentingan rakyat (Luthfi J. Kurniawan, 2021:15). Semuanya hanya mengatasnamakan rakyat tapi tujuan utamanya adalah mencari keuntungan pribadi. Maka tidaklah menjadi hal yang aneh jika banyak dari masyarakat Indonesia tidak mau divaksin. Ada begitu banyak orang yang tidak mau divaksin dengan beragam alasan. Tercatat bahwa sebanyak 30% yang tidak yakin akan keamanan vaksin, 22% tidak yakin efektif, 12% takut efek samping, 13% tidak percaya vaksin, 8% tidak percaya karena keyakinan agama, 15% yang tidak sebutkan (universitas Mulawarman, 2021: 7). Dengan data ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya kebijakan untuk menerapkan kegiatan vaksin di Indonesia sendiri masih dalam pro dan kontra. Tapi sekalipun semua masyarakat Indonesia setuju untuk menggunakan vaksin sebagai cara untuk melawan covid-19, hemat saya langkah ini merupakan langkah yang bisa dibilang terlambat, karena jika sejak awal saat covid-19 sedang ramai di perbincangkan di Cina, mestinya pemerintah mengambil langkah yang cepat dan tegas untuk menutup semua akses keluar masuk kedalam negeri. Tapi yang dilakukan malahan sebaliknya, ketika covid 19 sudah terdeteksi di Indonesia, baru pemerintah berusaha untuk menutup akses keluar masuk, itu ibarat memasukan singa kedalam kandang yang penuh dengan kambing dan pada akhirnya semua kambing mendapat peluang 99% terkena gigitan.

Covid 19 menjadi persoalan yang sangat ramai dan bahkan menjadi sangat seram untuk di bicarakan di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengupayakan beberapa cara agar covid 19 ini tidak menyebar secara luas yaitu dengan langkah vaksinasi. Sama seperti yang sudah saya katakan diawal bahwa, sekalipun vaksin adalah usaha dari pemerintah untuk mengurangi tingkat penyebaran covid 19, namun masyarakat mengkritisi kebijakan itu karena di anggap tergesa-gesa tanpa disertai bukti empiris akan kehasiatan lanjutan vaksin (Akbar, 2021:248). Dan menurut saya, kebijakan vaksin ini tidak salah dari satu sisi, karena berusaha mengatasi masalah covid ini, namun pada sisi yang lain, kebijakan vaksinasi ini semacam dilakukan dengan penuh paksaan oleh pemerintah terhadap rakyat. Saya menaru asumsi bahwa kebijakan vaksin ini bukan hanya soal pencegahan penyebaran terhadap covid 19 ini, namun kebijakan vaksin dapat menjadi alat penjajahan baru yang terjadi di Indonesia yang mungkin melibatkan para pemimpin negara atau kaum kapitalis. Sama seperti yang dikatakan Albert Kamus dalam bukunya yang berjudul Krisis Kebebasan, ia katakan bahwa masalah utama abad ke-20 ini adalah penjajahan (2013:32) dengan demikian satu yang ditakuti dan selalu menjadi kecemasan penulis adalah bahwa vaksin ini merupakan sarana atau media yang digunakan oleh para elit asing untuk menjajah kita, bangsa Indonesia. Atau dengan kata lain vaksin covid-19 berkorelasi terhadap kepentingan negara dalam kerangka menciptakan sumber-sumber kekayaan baru dan meningkatkan pendapatan (dari para kaum kapitalis) (Akbar, 2021: 249). Hal ini saya katakan karena hampir semua vaksin yang di gunakan, didatangkan dari negara- negara maju. Karena dapat saja terjadi bahwa negara membangun relasi dengan perusahaan pembuat vaksin di negara maju, atau sebaliknya perusahaan asing yang memaksakan untuk penggunaan vaksin mereka dengan ancaman terhadap utang luar negri Indonesia yang sangat banyak, sehingga, dari pada dipaksa untuk melunaskan utang dalam keadaan yang penuh dengan krisis, maka jalan yang paling baik bagi pemerintah adalah dengan menetapkan segala kebijakan yang berasal dari negara

asing untuk diberlakukan di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Dadang Juliantara dalam bukunya meretas jalan demokrasi ia katakan bahwa;

“Dunia internasional sendiri sesungguhnya mempunyai harapan yang besar pada Indonesia terutama oleh tiga hal: sumber bahan mentah, sumber tenaga murah, dan pasar bagi produk negara-negara maju. Karena itulah, pola hubungan antara Indonesia dan dunia luar seringkali terasa seperti dua insan yang dimabuk asmara: benci tapi rindu. Kadang Indonesia ditekan, tapi ketika Indonesia unjuk gigi, mereka memperlunak. Sebaliknya jika Indonesia “semau gue” mereka mengancam secara lebih serius sehingga terpaksa Indonesia “mempermanis” perilaku. Artinya, hubungan Indonesia dengan modal asing sudah semakin sulit dilepaskan. Terdapat satu relasi saling ketergantungan yang sangat kuat” (1998:143).

Ini dapat berarti bahwa sebagian besar kebijakan yang diterapkan di Indonesia selalu ada campur tangan dari negara asing. Hal ini saya katakan karena, nyata bahwa pemerintah Indonesia sudah dan sedang melaksanakan kebijakan, bahwa bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki surat vaksin, sedangkan bagi yang tidak memiliki surat vaksin tidak dilayani apabila melakukan perjalanan. Dan itu bukan hanya terjadi di bidang perjalanan saja, hampir disemua sektor yang melibatkan pemerintah. Hal itu dilakukan supaya, jika seluruh masyarakat Indonesia mau divaksin, maka akan semakin cepat vaksin yang didatangkan dari negara maju laris terjual. Maka benarliah apa yang dikatakan Dadang Juliantara bahwa Indonesia adalah pasar bagi produk-produk negara-negara maju.

Hemat saya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini membuat kebebasan kita dibatasi, atau dengan kata lain kebebasan saya dipenjara oleh kebijakan pemerintah. Dengan demikian ada satu nilai yang terus di eksploitasi dan dilacurkan-kebebasan-dan kemudian kita dapatkan bahwa dimana-mana, bersama dengan kebebasan, keadilan juga dinodai (Albert Camus, 2013: 108). Namun yang menjadi pertanyaan sekarang apakah kita masih pantas di sebut negara demokrasi jika kebebasan masyarakat dipenjara dengan aturan yang dipaksakan? Ataukah ini merupakan langkah baru negara - negara maju untuk menjajah bumi Indonesia ini? Saya beranggapan bahwa kebijakan wajib vaksin tidak sepenuhnya lahir dari pikiran pemerintah Indonesia saja, mungkinkah ada satu otak asing yang berdiri dibelakang pemerintah Indonesia, yang menjadi perancang semua kebijakan, yang semata-mata hanya mencari keuntungan individu dan kelompok kecil saja? Ataukah ini merupakan kebijakan sekelompok kaum kapitalis di Indonesia yang berusaha mencari keuntungan dengan pengadaan vaksin, agar mereka semakin berlimpah harta ditengah kemiskinan masyarakat kecil? Ini merupakan bentuk penjajahan baru kepada masyarakat kecil oleh kaum kapitalis. Mengapa tidak, semua masyarakat dipaksa supaya divaksin. Tindakan pemaksaan merupakan tindakan memenjarakan kebebasan setiap individu untuk secara bebas menentukan apakah dia mau divaksin atau tidak. Divaksin dan tidak divaksin merupakan pilihan bebas dari masing-masing individu. Toh pada nyatanya ada juga orang yang meninggal setelah divaksin. Jadi semestinya tidak ada alasan yang tegas untuk mewajibkan semua orang harus divaksin. Namun realitas di Indonesia tidaklah demikian. Semua masyarakat harus divaksin agar tetap diperhatikan oleh pemerintah atau negara. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang yang tidak atau belum divaksin bukan merupakan warga negara Indonesia? Hemat penulis ini menjadi kebijakan yang sangat tidak bijak. Karena surat vaksin menjadi syarat pertama dan utama jika berhubungan dengan negara. Surat vaksin menjadi syarat mutlak jika seseorang ingin berhubungan dengan negara atau pemerintah. Mestinya setiap Kebijakan harus diuji coba, sebelum diterapkan, sehingga kita bisa memberi penilaian secara umum untuk menentukan apakah kebijakan itu bijak ataukah kebijakan itu tidak bijak. Pada nyatanya hal itu tidak

sama sekali diterapkan di Indonesia. Ada pun pertanyaan yang muncul sekedar menguji apakah kebijakan vaksinasi dapat terus ditetapkan ataukah kita harus cepat untuk mengakhirinya, yaitu “bagaimana dengan orang yang sedang sakit dan hampir mati yang oleh keluarganya akan di bawah menggunakan pesawat ke rumah sakit, tapi dia tidak memiliki surat vaksin. Apakah pemerintah tetap melarang dia untuk naik pesawat karena tidak adanya surat vaksin, ataukah dia dibiarkan pergi dengan alasan kemanusiaan?” ini merupakan pertanyaan untuk menguji apakah kita masih ingin mempertahankan vaksinasi atau sesegera mungkin untuk menyuduhnya. Karena jika kita pertahankan, maka kita secara tidak langsung mendukung dan rela menjadi korban dari kejahatan yang sedang dilakukan oleh para kaum kapitalis. Jadi menurut saya tindakan atau kebijakan vaksinasi ini adalah penjajahan yang dilakukan oleh kaum kapitalis untuk dengan sekenanya mengatur dan mengontrol masyarakat kelas teri, bukan karena mereka ingin masyarakat menjadi lebih baik, melainkan agar masyarakat mati dalam kebodohan mereka. Dan pada akhirnya kaum kapitalis akan tertawa dengan sangat lebar, karena mereka sudah membodohi orang bodoh dengan kebodohnya. Inilah yang menurut penulis merupakan bentuk penjajahan baru di Indonesia, yang menggunakan vaksin sebagai sarana pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati, karena banyak bantuan dari negara maju yang sebenarnya tersimpan rahasia yang begitu besar yang tidak kita ketahui. Ada konsensus yang berkembang dari para ahli dan praktisi bahwa bantuan internasional memerlukan perubahan dramatis agar menjadi lebih efektif, lebih transparan, dan tidak terlalu rentan terhadap pemborosan, korupsi dan kerugian (Melissa Mann, Casey Pifer, dan A. J. Skiera, 2019: 19). Ini berarti bahwa jika pemerintah Indonesia tidak hati-hati, maka negara akan dengan mudah dikerok oleh negara lain dengan cara yang kita kira sangat mulia, namun sesungguhnya tersimpan banyak racun yang dapat membunuh kita kapan saja. Dan bisa menjadi kemungkinan bahwa vaksin adalah salah satu cara yang digunakan untuk menjajah kita secara halus tanpa kita sadari.

KESIMPULAN

Jadi, hadirnya Kebijakan pemerintah tentang pengadaan vaksin bukan semata-mata memiliki tujuan yang mulia, yaitu mengatasi masalah penyebaran covid-19, namun ada agenda tersembunyi yang tidak diketahui oleh banyak orang, terutama masyarakat kecil, yaitu sebagai penjajahan atas mereka (masyarakat kecil) oleh para elit negara dan kaum kapitalis yang dengan serakah mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan sendiri dan kolega. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kebijakan vaksinasi bukanlah kebijakan yang sangat bijak, melainkan kebijakan yang penuh dengan rahasia tersembunyi dari para elit negara atau kaum kapitalis. Dengan demikian vaksinasi bukan hanya menjadi usaha pemerintah untuk menyembuhkan masyarakat tetapi juga untuk menguasai masyarakat. Dan masyarakat hanya dijadikan objek politik pembangunan yang hanya sebatas menyebut demi kepentingan rakyat (Luthfi J. Kurniawan, 2021:15), tapi sesungguhnya itu dilakukan demi keuntungan pribadi dan kolega atau keluarganya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhamin Ramdhan, Hidayat A Rizal, Mulyani Eldha. Diplomasi vaksin covid-19 dan budaya anarki dalam sistem internasional. Dalam jurnal politica.
- Chairani Ikfina. Dampak pandemi covid-19 dalam perspektif gender di Indonesia. Dalam jurnal Kependudukan Indonesia, 39:42 Papua: Juli, 2020.
- Jakarta, CNN Indonesia. Dana APBN Rp 10,2 T sudah terpakai untuk beli vaksin covid. Diunduh pada 3 februari 2023 melalui website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210712144639-532-666559/dana-apbn-rp102-t-sudah-terpakai-untuk-beli-vaksin-covid>.

- Kompas. Com. 30 orang meninggal usai vaksinasi covid-19, komnas KIPi sebut karena penyakit jantung hingga diabetes. Diunduh pada 3 februari 2023 melalui website: <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/20/19091041/30-orang-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-komnas-kipi-sebut-karena-penyakit?page=all>.
- Fadli Rizal. 10 vaksin corona yang digunakan di Indonesia. Diunduh pada 3 februari 2023 melalui website: <https://www.halodoc.com/artikel/6-vaksin-corona-yang-digunakan-di-indonesia>.
- Kumiawan J Luthfi. Keadaban Politik: membincang kekuasaan merawat kewarasan. Malang. Intrans publishing, 2021.
- Mulawaman Universitas. Peran vaksin dalam penanganan pandemic C19. Dalam jurnal SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Laboraturium Ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran.
- Akbar Idil. Vaksinasi covid-19 dan kebijakan negara: Perspektif ekonomi Politik. Dalam jurnal Academia Praja, 4:1 Bandung; Februari, 2021.
- Kamus Albert. Krisis Kebebasan. Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2013.
- Juliantara Dadang. Meretas Jalan Demokrasi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.